

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Novi Natalia Padang¹, Wendi Suprpto Padang²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

²Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Email: novipadang06@gmail.com¹, wendisuprptopadang@gmail.com²

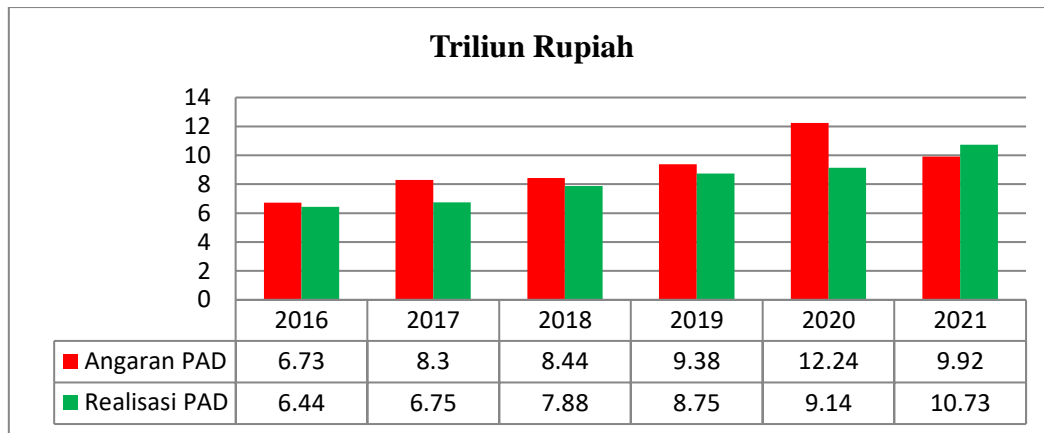
ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of regional own-source revenue (PAD), balancing funds, and capital expenditure partially on the financial performance of local governments in the districts/cities of North Sumatra Province. The population for this study is the districts/cities of North Sumatra Province, consisting of 33 districts/cities with the observation years 2014 to 2021. The type of sample uses a saturated sample where the population is the sample. The data is processed using the panel data regression statistical test method. The results of this study prove that regional own-source revenue, balancing funds partially have a positive and significant effect on the financial performance of local governments in the districts/cities of North Sumatra Province. Meanwhile, capital expenditure has no effect on the financial performance of local governments in the districts/cities of North Sumatra Province.

Keywords: *Local Own Revenue, Balance Fund, Capital Expenditures, Performance, Regional Government Finance*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendapatan yang optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah. Selain itu diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya modal. Berikut ini sebagai gambaran mengenai Pendapatan Asli daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

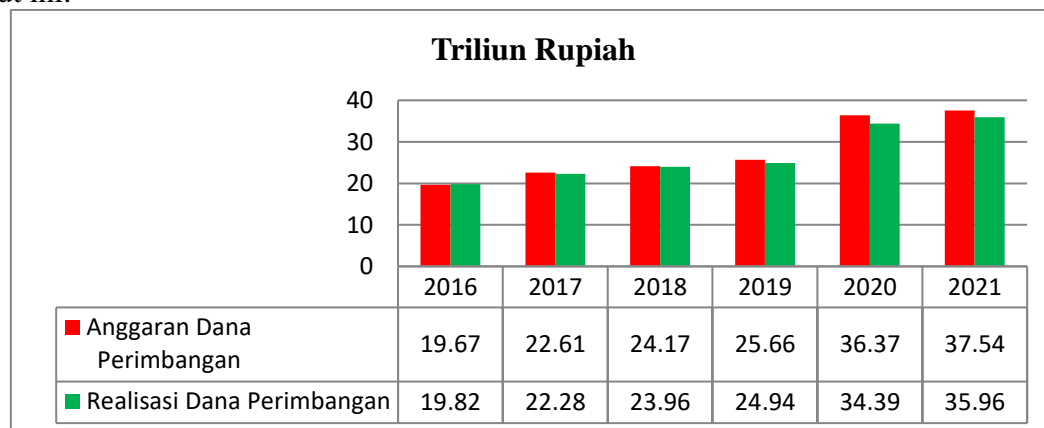


Gambar 1.. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumut 2016-2021

Sumber data: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan PAD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja keuangan pemerintah terjadi pada tahun 2021, dimana pemerintah daerah mampu menghasilkan PAD melebihi anggaran sebesar 0,81%. Halim (2001) menyatakan permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD harus secara optimal sehingga meningkatkan perekonomian daerah khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan dapat diklasifikasikan menjadi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Penerimaan dana perimbangan di provinsi kabupaten/kota Sumatera Utara digambarkan berikut ini.

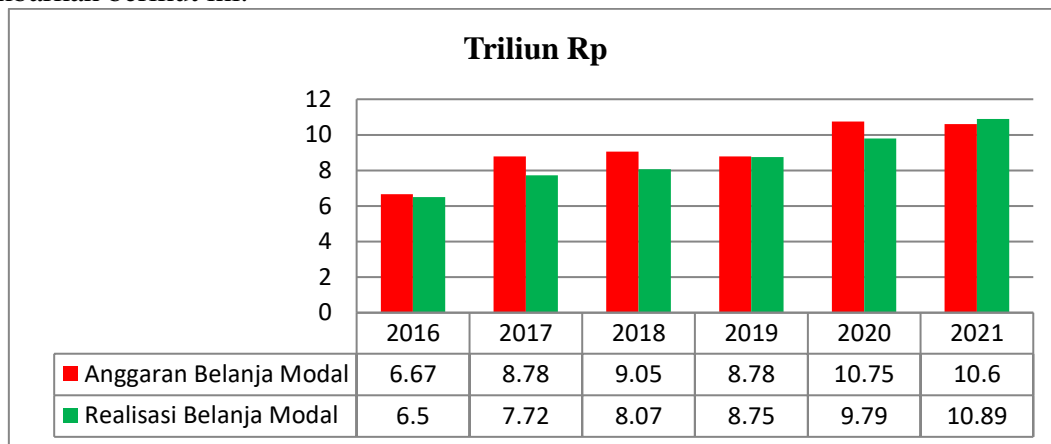


Gambar 2. Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumut 2016-2021

Sumber data: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas anggaran dana perimbangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan realisasi dana perimbangan yang diterima daerah lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Artinya pemerintah telah mampu mengurangi kontribusi dana perimbangan jika dibandingkan dengan anggaran, namun belum mampu untuk menurunkan realisasi dana perimbangan selama 2016-2021.

Selain menilai kinerja keuangan pemerintah daerah melalui PAD dan dana perimbangan, maka belanja modal juga dapat menjadi ukuran yang tidak dapat diabaikan. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan daerah dan memberi manfaat jangka panjang. Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Besarnya alokasi belanja modal di provinsi kabupaten/kota Sumatera Utara digambarkan berikut ini.



Gambar 3. Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumut 2016-2021

Sumber data: www.djpk.depkeu.go.id

Dari data diatas dapat disimpulkan sementara bahwa belanja modal sebagai pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan daerah ternyata belum dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Namun untuk tahun 2021 terjadi peningkatan belanja modal 0,29 % yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

Melihat fenomena yang terjadi diatas peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi grand teori dalam penelitian ini, masyarakat atau publik yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Dua sisi kepentingan yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik, publik seringkali tidak puas dengan hasil kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah selaku agen lebih mementingkan kesejahteraan sendiri, maka diperlukan regulasi untuk mengatur perbedaan kepentingan ini. Jansen dan Meckling dalam Santoso dan Joni (2012). Hendriksen (2005) dan Scott (2003) dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent)

untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Signalling Theory

Menurut Richard D. Morris (1987), teori sinyal dikembangkan untuk menangani masalah asimetri informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan pemberian sinyal informasi dari pihak yang memiliki informasi lebih kepada pihak stakeholder yang kurang memiliki informasi. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan.

Pada sektor publik teori *signalling* merupakan teori yang menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah memiliki dorongan untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah memberikan signal kepada masyarakat karena adanya asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memberikan signal kepada masyarakat dalam bentuk informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya serta pengungkapan dengan penjelasan yang lebih detail. Hal itu dilakukan agar masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kinerja pemerintahan tersebut perlu diberitahukan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah maupun sebagai bentuk promosi yang memiliki tujuan politik. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.

Implikasi teori *signalling* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanah memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pelaksanaan kinerja keuangan daerah yang maksimal dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2004), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dalam suatu unit organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho dan Rohman, 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU 33/2004 menyatakan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2001), PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan pengertian tersebut, di dalam UU 28/2009 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah akan memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sihite (2010) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PAD suatu daerah menggambarkan kemampuan atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemandirian suatu daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Dana Perimbangan

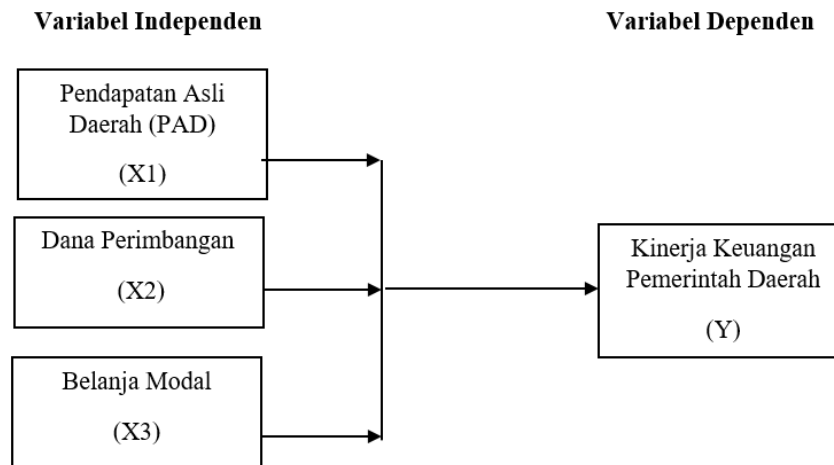
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2013 : 107) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual



Gambar 4. Kerangka Konseptual

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah dan kenaikan pendapatan asli daerah dalam setiap tahun anggaran akan menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian yang dilakukan Leki, *et al* (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan Sihite (2010) bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Penelitian Andirfa, *et al* (2016) menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sejalan dengan Julitawati, *et al* (2012) dan penelitian Budianto dan Alexander (2016).

H2 : Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dalam menambah aset atau kekayaan daerah. Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah maka akan memberikan umpan balik peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan dari investor sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ajani, *et al* (2015)

Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan Puspitasari, *et al* (2015) serta Mulyani dan Wibowo (2017).

H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara selama delapan tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://www.djpk.depkeu.go.id>) dan situs <http://www.bps.sumut.go.id>.

Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Sumatera Utara, yang terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tahun 2014 s.d 2021. Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi menjadi sampel yaitu berjumlah 264 sampel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *Eviews 7* dikarenakan dalam penelitian ini terdapat karakteristik data *cross section* dan *time series* secara bersamaan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata, deviasi standar, minimum, dan maksimum.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan data panel memiliki kelebihan yaitu data yang digunakan lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolinearitas yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien.

Uji Chow

Uji Chow test atau *likelihood ratio test* merupakan sebuah pengujian untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect yang tepat*. *Chow test* merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih model yang lebih baik antara model *common effect* atau *fixed effect*, apabila nilai probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima

Uji Hausman

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistic *chi square* dengan *degree of freedom* adalah sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen, apabila nilai statistik *chi square* lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang lebih baik adalah model *random effect*, apabila nilai

statistik *chi square* lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model *fixed effect* (Widarjono, 2013).

Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data *cross section* dan data *time series* (Widarjono, 2013). Regresi dengan data panel diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pengujian dilakukan melalui alat analisis yaitu *software Eviews 7*.

Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. jika nilai probabilitas $< 0,05$,

Uji Parsial (t)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat diuji dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha < 0,05$. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam uji secara parsial

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian kontribusi pengaruh seluruh variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2) dimana $0 < R^2 < 1$. Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel KKPD, PAD, DP, BM

Variable	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan(DP)	Belanja Modal (BM)
Min	0.011	1,057,429,832	61,664,021,038	16,833,467,955
Max	1.383	1,739,756,922,634	2,122,769,416,793	997,475,991,902
Mean	0.111	99,140,662,160.18	644,461,495,187.31	200,837,273,545.63
Std. Deviation	0.165	236,984,825,945	352,166,913,076	138,747,457,915

Sumber: Hasil Olah *software Eviews 7*

Berdasarkan tabel 1 statistik deskriptif, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)

Kinerja keuangan pemerintah daerah terendah selama tahun 2014-2021 adalah pada tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Nias Barat, dan yang tertinggi pada tahun 2017 di Kabupaten Asahan. Standar deviasi menunjukkan adanya kesenjangan yang disebabkan perbedaan sumber daya atau potensi yang ada di kabupaten/ kota Provinsi Sumatera

Utara.

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan asli daerah terendah selama tahun 2014-2021 adalah pada tahun 2014 di Kabupaten Nias Barat, dan yang tertinggi pada tahun 2021 di kota Medan. Standar deviasi menunjukkan adanya kesenjangan yang disebabkan perbedaan pengelolaan sumber daya ekonomi dan tingkat partisipasi publik dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3. Dana Perimbangan (X2)

Dana Perimbangan terendah selama tahun 2014-2021 adalah pada tahun 2015 di Kota Gunung Sitoli, dan yang tertinggi pada tahun 2021 di Kota Medan. Standar deviasi menunjukkan adanya kesenjangan yang disebabkan perbedaan celah fiskal (*fiscal gap*) atau ketidakseimbangan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah.

4. Belanja Modal (X3)

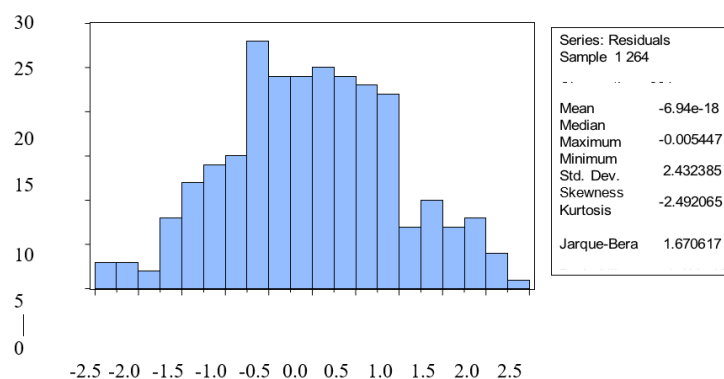
Belanja modal terendah selama tahun 2014-2021 adalah pada tahun 2014 di Kota Gunung Sitoli, dan yang tertinggi pada tahun 2021 di Kota Medan. Standar deviasi menunjukkan adanya kesenjangan yang disebabkan perbedaan pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur dan penambahan aset daerah atau investasi daerah.

5.1. Uji Asumsi Klasik

5.1.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik J-B, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.
- Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Gambar 5. Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera

Sumber: Hasil Olah *software* Eviews 7

Berdasarkan Gambar 5., diketahui nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0,433741. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,433741 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

5.1.2. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, yakni di atas 0,9, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah	1.000000	0.691468	0.700647
Dana Perimbangan	0.691468	1.000000	0.647241
Belanja Modal	0.700647	0.647241	1.000000

Sumber: Hasil Olah *Software Eviews 7*

Berdasarkan Tabel 5.2 hasil pengujian multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini karena nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih dari 0,9.

5.1.3. Uji Autokorelasi

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin- Watson berkisar di antara 0 dan 4. Berdasarkan Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin- Watson (lampiran 5), nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,780525. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yakni $1 < 1,780525 < 3$, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

5.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Breusch-Pagan. Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas, diketahui nilai *Prob Obs*R-Squared* adalah 0,1229 > 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

5.2. Pemilihan Metode Estimasi

5.2.1. Uji Chow

Untuk menentukan apakah model estimasi CEM atau FEM dalam membentuk model regresi, maka digunakan uji Chow.

Hipotesis yang diuji sebagai berikut.

H_0 : Model CEM lebih baik dibandingkan model FEM.

H_1 : Model FEM lebih baik dibandingkan model CEM Aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas *cross-section Chi-square* < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika nilai probabilitas *cross-section Chi-square* \geq 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil dari uji Chow dengan menggunakan Eviews 7 (lampiran 9), diketahui nilai probabilitas adalah 0,0015. Karena nilai probabilitas $0,0015 < 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *fixed effect model* (FEM).

5.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi FEM atau REM dalam membentuk model regresi. Berdasarkan uji Hausman dengan menggunakan Eviews 7 (lampiran 10), diketahui nilai probabilitas adalah 0,0136. Karena nilai probabilitas $0,0136 < 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *fixed effect model* (FEM).

5.3. Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian pengaruh simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji t).

5.3.1. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi kekuatan variabel lain didalam menjelaskan variabel terikatnya. Variabel lain dimaksud dalam penelitian ini adalah variabel – variabel diluar pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal. Hasil analisis koefisien determinasi (lampiran 7), diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) sebesar

$R^2 = 0,339$. Nilai tersebut dapat diartikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, *fiscal stress* secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 33,9% sisanya sebesar 66,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5.3.2. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama- sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan uji F (lampiran 7), diketahui nilai *Prob. (F-statistics)*, yakni $0,000000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas, yakni pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3.3. Persamaan Regresi Linear Berganda dan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Hasil pengujian secara parsial (Uji t) dengan menggunakan *fixed effect model* (FEM). dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pendapatan Asli Daerah	0.236194	0.091692	2.575962	0.0106
Dana Perimbangan	0.305881	0.150383	2.034019	0.0431
Belanja Modal	0.138591	0.126756	1.093364	0.2754
C	-5.375698	0.952512	-5.643704	0.0000

Sumber: Hasil Olah *Software* Eviews 7

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -5,375698 + 0,236194PAD + 0,305881DP + 0,138591BM + 0,385439FS + e$$

Berdasarkan tabel 5.3, diketahui:

1. Nilai konstanta sebesar -5.375698 artinya jika pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 5.375698.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.236194, yakni bernilai positif. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Diketahui nilai Prob adalah 0.0106, yakni $< \text{tingkat signifikansi } 0,05$, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel dana perimbangan adalah 0.305881, yakni bernilai positif. Hal ini berarti dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Diketahui nilai Prob adalah 0.0431, yakni $< \text{tingkat signifikansi } 0,05$, maka dana perimbangan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Nilai koefisien regresi dari variabel belanja modal adalah 0.138591, yakni bernilai positif. Hal ini berarti belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Diketahui nilai Prob adalah 0.2754, yakni $>$ tingkat signifikansi 0,05, maka belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya belanja modal belum memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menggambarkan tingkat kemandirian daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang berasal dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *signalling*, dimana implikasi dari teori *signalling* dalam penelitian ini adalah pemberian signal yang positif bagi masyarakat melalui peningkatan PAD agar pemerintahan tetap didukung oleh masyarakat. Sejalan dengan Leki, *et al* (2018) melakukan penelitian di kabupaten Halmahera Barat tahun 2008-2017 yang membuktikan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ajani, *et al* (2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Nusa Tenggara Barat yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka kinerja keuangan semakin baik atau mandiri, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah daerah di NTB dapat memenuhi pembiayaannya untuk belanja daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan merupakan penerimaan yang paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya dalam upaya pembangunan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hasil pengujian membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yaitu pemerintah daerah lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Pemerintah daerah berupaya untuk membangun perekonomian dengan bantuan dana perimbangan. Penelitian ini menunjukkan peningkatan dana perimbangan diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya. Meningkatnya penerimaan dana perimbangan yang dikelola dengan baik untuk pembangunan menyebabkan naiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini didukung oleh Badjra, *et al* (2017) yang menunjukkan dana perimbangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Bali.

3. Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *signalling* dimana pemerintah daerah berusaha untuk memberi sinyal yang baik melalui belanja modal. Realisasi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan agar rakyat dapat terus mendukung pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini belanja modal yang dialokasikan pemerintah belum mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, realisasi belanja modal yang cenderung lambat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah menyebabkan belanja modal belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini yang menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Leki, *et al* (2018) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Alokasi belanja modal masih sangat kurang dalam membiayai pembangunan yang dikarenakan PAD yang dihasilkan pemerintah daerah relatif sangat rendah periode tahun 2008- 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajani., Akram., H. (2015). Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat. *Infestasi Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 20–39. <https://doi.org/10.16285/j.rsm.2007.10.006>
- Amrozi, A. I. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 1–10.
- Andirfa, Mulia, H. dan S. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Ankamah, S. S., & Yao, F. (2013). Evaluating The Effectiveness Of Local Revenue Mobilization In Kumasi, Ghana. *Lex Localis*, 11(3), 431–451.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11 (1), 68–79.
- Badjra, Mustanda, Abudanti. 2017. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 29-40.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik* (Suatu Pengantar). Jakarta. Erlangga.
- Blow, L., Hall, J., & Smith, S. (1996). Financing Regional Government In The UK: Some Issues. *Fiscal Studies*, 17(4), 99–120.
- Boučková, M. (2015). Management Accounting and Agency Theory. *Procedia Economics and Finance*, 25(15), 5–13.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511/14084>
- Cho, K. W., Brower, R., & Ahmad, M. S. (2018). Factors That Influence County Government Expenditures And Revenues: A Study Of Florida County Governments. *Lex Localis*, 16(1), 47–76.
- Dongori, Dessy Patricia F. 2006. Pengaruh Tekanan Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Dougherty. Kenneth & Soo. (2000). The Relationship Between Public Finance Issues, Financial Manajement Issues, And Conditions Of Fiscal Stress In Small And Rural Government: The Case Of Wesr Virginia. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 12(4), 545–565.
- Erlina. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*l. Salemba Empat. Jakarta.
- Francois, K. (2007). Indicator Of Revenues And Expenditures Of State And Local Government: A Measurement Model Approach. *Jurnal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 1–32.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi 8. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10*. Edisi 2. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. “Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah”. *Kompak*, STIE Yogyakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Jinping, S. (2005). The Dynamics Of Government Revenue Forecasting From An Organizational. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 17(4), 527–556.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Kloot, L. (1999). Performance Measurement And Accountability In Indonesian Local Government. *Curtin Business School*, 12(7), 565–584.

- Korompot, R., & Warongan, J. (2018). Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi. *Accountability*, 6(2), 9–19. <https://doi.org/10.32400/ja.17755.6.2.2017.9-19>
- Kurniawati, S., Busaini, H., & M., R. S. P. (2017). Determinants of Financial Performance: Study of Local Governments in West Nusa Tenggara. *International Conference and Call for Papers*, 1536–1560.
- Leki, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(05), 164–174.
- Liu, J., Hu, X., & Wu, J. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Financial Efficiency: An Empirical Analysis of Spatial Durbin Model. *Hindawi Publishing Corporation*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/02664763.2016.1252733>
- Liviani, Shiela, Putu dan Liliana. 2016. Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan Pengaruh Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Manajemen Universitas Surabaya*, 11(1), 102-120.
- Lubis, Ade Fatma. 2012. *Metodologi Penelitian*. USU Press. Medan.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Muryawan, sang, M., & Sukarsa, M. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten / Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10), 440–451
- NN Padang. (2023). Bijak Mengelola Keuangan. *Devotionis*, 27-29.
- NN Padang. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 130-135.
- NN Padang. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*.
- NN Padang. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemberian Suku Bunga Kepada Nasabah dan Debitur pada PT. Bank X di Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 110-118.
- NN Padang. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Erp terhadap Peningkatan Indeks Kepuasan Nasabah di PT. Bank X di Medan, Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 204-209.
- NN Padang. (2021). Perbandingan Sistem Pusat dan Desentralisasi Penataan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 58-63.
- NN Padang. (2022). Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran Pada Masa Pandemi. *Devotionis*, 13-15.
- NN Padang (2022). Penyuluhan Tentang Teknik Menyusun Anggaran. *Devotionis*, 34-36.
- Nugroho, A.B. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistika Dengan SPSS*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2): 1-14.
- Nyman, C., Nilsson, F., & Rapp, B. (2006). Accountability In Local Government: A Principal-Agent Perspective. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 9(2), 123–137.
- Puspitasari., Adiputra., & S. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (

- Studi Kasus di Kabupaten Buleleng). *E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–10.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sihite, Friska. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan *Fiscall Stress* Terhadap Kinerja Keuangan Di Kabupaten Dan Kota Propinsi Sumatera Utara. *Tesis S2 Program Pasca sarjana USU*. Medan.
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yan, Wenli. 2012. The Impact Of Revenue Diversification And Economic Base On State Revenue Stability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(1), 58-81.
- <https://sumut.bps.go.id>
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>